



SEKTOR PENDAPATAN MASIH BELUM STABIL

Juli, APBD Kembali Dirasionalisasi

YOGYA (KR) - Surat Edaran (SE) Walikota Yogya terkait rasionalisasi anggaran yang berdampak pada penghentian sementara sejumlah kegiatan akan berakhir 30 Juni. Bulan depan APBD Kota Yogya pun akan kembali dirasionalisasi dengan mempertimbangkan pendapatan yang masih belum stabil.

Wakil Walikota Yogya Heroe Poerwadi, mengatakan sektor pendapatan yang terus turun mengakibatkan kemampuan daerah dalam mengulirkan program menjadi berkurang. "Juli akan rasionalisasi lagi, terutama ketika ada ketentuan baru dari pemerintah pusat. Yang jelas pendapatan terus turun," jelasnya, Kamis (11/6).

Pada tahun lalu sektor pendapatan daerah mencapai sekitar Rp 680 miliar. Jika dikalkulasi dalam sehari rata-rata ada pemasukan sebesar Rp 1,5 miliar. Salah satu pendapatan yang menjadi primadona ialah pajak hotel. Selama pandemi Covid-19, kalangan perhotelan menjadi sektor yang terpukul karena anjaknya wisatawan. Begitu pula sektor pajak lain seperti restoran, hiburan, hingga bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Meski demikian, pihaknya tetap

menjamin layanan publik dapat berjalan dengan baik dan aktivitas ekonomi masyarakat juga bisa berputar. "Masyarakat yang sebelumnya hanya menunggu di rumah, kini sebagian mulai aktif dengan dibarengi protokol yang ketat. Minggu kemarin pedagang batik di Pasar Beringharjo juga mulai ada pembeli meski belum pulih. Sembari kita kuatkan protokol, aktivitas ekonomi bisa kembali lagi," urainya.

Sementara dalam rapat koordinasi antara tim eksekutif dengan Komisi B DPRD Kota Yogya, pendapatan daerah menjadi pencerminan bersama. Selama pandemi situasi perekonomian bergerak lambat hingga berimbas pada pendapatan daerah. Bahkan per Mei 2020 realisasi penerimaan pajak daerah baru mencapai 29,26 persen atau Rp 131,9 miliar.

Selain pajak daerah, Pemkot Yogya

juga mendapatkan alokasi dana perimbangan sebesar Rp 48,3 miliar serta dana alokasi umum Rp 48,2 miliar per bulan. Jika ditambah dengan perolehan retribusi maupun pendapatan lain-lain yang sah, kondisi riil keuangan Pemkot Yogya saat ini Rp 212,8 miliar.

Anggota Komisi B DPRD Kota Yogya Fokki Ardiyanto, menilai jika tidak ada tambahan pendapatan maka kemampuan Pemkot dan DPRD dalam mengulirkan urusan wajib hanya bisa bertahan hingga empat bulan ke depan atau September. "Tapi tiap bulan masih ada pemasukan meski tidak sesuai target. Apabila situasi pandemi ini tidak ada kebijakan progresif dari pemerintah pusat atau DIY dalam bergerak ke kehidupan *new normal*, maka pergerakan ekonomi juga hanya akan berjalan di tempat," tandasnya.

Oleh karena itu, dirinya berharap ada kesadaran bersama dari seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat bahwa Covid-19 masih akan terus ada dan berdampak dengan kita. Sehingga harus segera bangkit dengan menjalani kehidupan dengan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin. **(Dhi)-f**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. BPKAD			

Yogyakarta, 06 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005